

## Politik Resistensi Sosial dalam Kebijakan Rehabilitasi Pasar Ploso Kabupaten Jombang

**Mohammad Dias Sanjaya**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
10010122012@student.uinsby.ac.id

**Moh. Zainor Ridho**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
zainorridho@uinsa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji resistensi sosial pedagang Pasar Ploso terhadap kebijakan rehabilitasi pasar yang dianggap minim partisipasi dan kurang transparan. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis bagaimana pedagang merespons kebijakan yang dibuat secara top-down. Kerangka teori James C. Scott tentang resistensi sosial digunakan untuk membaca respon pedagang terhadap kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi muncul dalam bentuk penundaan relokasi, berjalan di area terlarang, ketidakpatuhan halus, serta keluhan informal akibat ketidakpastian ekonomi dan ketimpangan informasi. Penelitian menyimpulkan bahwa resistensi terjadi karena kebijakan tidak membuka ruang negosiasi dan kurang melibatkan pedagang, sehingga legitimasi sosial kebijakan menjadi lemah.

**Kata Kunci:** Resistensi Sosial, Rehabilitasi pasar, Kebijakan Publik

### Abstract

This study examines traders' social resistance to the rehabilitation policy of Pasar Ploso, which they perceived as lacking transparency and participation. Using a qualitative case study approach through interviews, observations, and document analysis, the research explores how traders responded to a top-down policy process. The analysis employs James C. Scott's social resistance theory. Findings show that resistance appeared in the form of relocation delays, trading in prohibited areas, subtle noncompliance, and informal complaints driven by economic uncertainty and information asymmetry. The study concludes that resistance arises from the absence of negotiation space and limited public involvement, weakening the policy's social legitimacy.

**Keywords:** Social Resistance, Market Rehabilitation, Public Policy

## PENDAHULUAN

Rehabilitasi pasar tradisional merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fisik pasar agar lebih layak, bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit<sup>1</sup>, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini biasanya diterapkan karena bangunan pasar sudah tua<sup>2</sup>, tidak aman, dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasar Ploso di Kabupaten Jombang menjadi salah satu contoh penerapan kebijakan ini. Pemerintah setempat merencanakan rehabilitasi karena kondisi pasar yang sudah tidak memadai, baik dari segi bangunan maupun fasilitas penunjang. Tujuannya adalah membangun infrastruktur yang baik terhadap sarana dan prasarana karena sangat menentukan dalam menunjang kelancaran aktifitas perekonomian di daerah yang mulai berkembang<sup>3</sup> dan juga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib dan sehat. Namun, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran dari para pedagang. Mereka khawatir kehilangan pelanggan, mengalami penurunan omzet, serta belum mendapat kepastian mengenai tempat sementara saat proses rehabilitasi berlangsung. Kasus penolakan atau perlawanan yang ringan ini membuat pelaksanaan pembangunan sedikit rumit<sup>4</sup>. Contoh bentuk resistensi yang muncul bersifat ringan ini disampaikan melalui forum-forum internal pedagang, dengan harapan adanya jaminan keberlanjutan usaha selama masa perbaikan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah guna mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan menyediakan tempat penampungan sementara yang relatif dekat dengan lokasi pasar lama.

---

<sup>1</sup> Hasanah, U., Lydianingtyas, D., & Setiono, J. (2024). Analisis Penerapan Smk3 Pada Proyek Rehabilitasi Pasar Jongke Kota Surakarta. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, 5(4), 20-28.

<sup>2</sup> Legi, C., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2023). Kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dalam Mengelola Pasar Tua Tombatu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. *GOVERNANCE*, 3(1).

<sup>3</sup> Pararuk, K., Malingkas, G. Y., & Mangare, J. B. (2023). Metode Pelaksanaan Konstruksi Pondasi Bor Pile Pada Bangunan Hanggar Proyek Rehabilitasi Pasar Bersehati Manado. *TEKNO*, 21(85), 1265-1272.

<sup>4</sup> Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.

Penataan lapak sementara tersebut didesain agar tetap memungkinkan terjadinya aktivitas perdagangan secara normal, dengan pengaturan zonasi dan fasilitas penunjang yang cukup layak. Skema ini berhasil meredam kekhawatiran pedagang, karena mereka tidak merasa kehilangan pelanggan secara drastis, dan tetap bisa menjalankan usahanya selama proses rehabilitasi karena proses Rehabilitasi Pasar Ploso direncanakan akan memakan waktu kurang lebih enam bulan, dimulai pada bulan Juli dan ditargetkan selesai pada Januari 2026. Selama masa pembangunan, seluruh pedagang akan dipindahkan sementara ke area yang berlokasi tidak jauh dari pasar utama, agar aktivitas jual beli tetap dapat berlangsung. Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat sisi sosial dari kebijakan yang secara teknis dianggap sederhana. Rehabilitasi pasar tidak hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, ekonomi, dan identitas kolektif masyarakat pasar. Resistensi tidak boleh dipahami semata sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian atas ketidakpastian yang belum terjawab secara jelas oleh pihak pembuat kebijakan.

Resistensi adalah suatu sikap/tindakan menolak, menyanggah, menghalangi, menentang, dari para anggota organisasi untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk melakukan perubahan<sup>5</sup>. Resistensi sosial dalam rehabilitasi pasar merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Para pedagang yang menolak rehabilitasi umumnya merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan mempertanyakan kejelasan regulasi yang ada. Tanpa perencanaan yang matang, rehabilitasi berisiko menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada stabilitas ekonomi local karena nantinya mereka perlu menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi<sup>6</sup>. Resistensi ini dapat dipandang sebagai kemerdekaan untuk bebas

---

<sup>5</sup> Muarif, M. R. F., & Darmiyanti, A. (2022). Resistensi dalam Kajian Manajemen Perubahan pada Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 5842-5847.

<sup>6</sup> Manalu, M. F. J. (2025). Transformasi Profetik Huria Kristen Batak Protestan dalam Konflik Sosial-Ekologis. *MARSAHALA: Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(1), 26-35.

bertindak menentukan nasib sendiri (mandiri)<sup>7</sup> atau dalam kerangka teori resistensi sosial yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana diungkapkan oleh Scott, resistensi dipandang sebagai bentuk perjuangan kelompok rentan untuk mempertahankan hak ekonomi dan sosial mereka dari kebijakan yang dirasakan tidak adil. Dengan memahami konteks resistensi ini, perumusan kebijakan rehabilitasi pasar dapat diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas konsep resistensi sosial dalam berbagai konteks, dalam hal ini konteks tersebut adalah Rehabilitasi pasar dalam teori kebijakan publik. Ariesta, I.<sup>8</sup> meneliti bahwa Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar perlu dilakukan, karena bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi, namun kebijakan ini justru memicu resistensi dari para pedagang yang merasa dirugikan secara ekonomi, terutama akibat ketentuan harga kios baru yang memberatkan, Rehabilitasi ini terjadi di Raya Padang pasca gempa 2009. Konflik tersebut bersifat materialistis, dengan benturan antara kepentingan pemerintah untuk mempertahankan regulasi dan pendapatan daerah, serta tuntutan pedagang yang menginginkan kompensasi adil. Pemerintah Kota Padang sempat menggunakan pendekatan represif, yang kemudian berkembang ke tahap mediasi dan negosiasi dengan bantuan lembaga seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. Studi ini menyoroti bahwa konflik muncul akibat kurangnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan, dan secara khusus menekankan pentingnya keterlibatan aktor-aktor perempuan dalam proses resolusi konflik (baik sebagai pedagang, aktivis, maupun representasi pemerintah) yang perannya ternyata masih terpinggirkan meskipun berada dalam masyarakat matrilineal.

---

<sup>7</sup> Muftiandar, E. (2021). Resistensi tokoh-tokoh perempuan lokal Papua terhadap budaya Patriarki dalam novel “Tanah Tabu” karya Anindita S. Thayf. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 5(2), 160-173.

<sup>8</sup> Ariesta, I. (2015). Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 41-52.

Sementara itu, Mulyono, E. C., & Alfin, C.<sup>9</sup> meneliti bahwa Perencanaan teknis rehabilitasi Pasar perlu dilakukan sebagai respons terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Pasar Baru Kabupaten Lumajang menjadi salah satu fasilitas yang memerlukan perhatian untuk direvitalisasi. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan berbagai permasalahan pasar sekaligus mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Diharapkan, peningkatan fasilitas perdagangan di kawasan ini dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi serta mendorong pertumbuhan kualitas dan kuantitas perdagangan lokal di Kabupaten Lumajang. Studi ini menganalisis proses perencanaan rehabilitasi Pasar Baru Tahap 3 di Kabupaten Lumajang yang mengusung konsep arsitektur ramah lingkungan, dengan pendekatan teknis berbasis survei lapangan, analisis tapak, desain ruang, dan utilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perencanaan yang berwawasan lingkungan ini tidak hanya sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga mampu memberikan alternatif desain yang nyaman, efisien, serta tetap mempertahankan nilai-nilai khas pasar tradisional seperti tawar-menawar dan aksesibilitas<sup>10</sup>.

Sementara Panyusunan, R.<sup>11</sup>, Meneliti bahwa resistensi sering terjadi yang berasal dari para pedagang yang merasa dirugikan akibat revitalisasi pasar. Bentuk resistensi muncul karena ketidakpuasan terhadap penataan kios yang dianggap tidak strategis, keterbatasan akses konsumen ke lokasi pasar baru, serta minimnya fasilitas pendukung seperti area parkir dan transportasi umum. Selain itu, pedagang juga menghadapi hambatan ekonomi berupa keterbatasan modal untuk beradaptasi dengan kondisi pasar pasca-revitalisasi. Pemerintah berusaha menangani resistensi tersebut melalui program sosialisasi dan upaya perbaikan fasilitas, namun pendekatan yang dilakukan dinilai belum sepenuhnya partisipatif.

---

<sup>9</sup> Mulyono, E. C., & Alfin, C. (2022). Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pasar Baru Kabupaten Lumajang Berwawasan Lingkungan. *Journal of Science Nusantara*, 2(2), 58-67.

<sup>10</sup> Sulistiyo, T. D., Gantina, D., Haryono, J., Rachmatullah, A., & Aditya, M. K. (2025). Keberadaan Pasar Tradisional di Jakarta Sebagai Destinasi Wisata. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 30(1), 66-84.

<sup>11</sup> Panyusunan, R., Nawawi, Z. M., & Tambunan, K. (2024). Analisis Penghambat Revitalisasi Pasar Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Aksara Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 30-39.

Minimnya pelibatan pedagang dalam proses perencanaan dan keputusan menyebabkan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah rendah. Beberapa pedagang bahkan menyatakan keinginan untuk kembali berdagang di lokasi lama karena merasa kehilangan pelanggan di lokasi baru. Hasil akhirnya, meskipun secara fisik pasar telah direvitalisasi, tujuan utamanya yaitu mengembalikan daya saing dan eksistensi pasar tradisional belum tercapai optimal. Revitalisasi dinilai belum mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi pedagang secara menyeluruh, sehingga keberlanjutan aktivitas perdagangan di pasar tersebut masih menghadapi tantangan serius.

Sejalan dengan peneliti sebelumnya. Harahap, M. F.<sup>12</sup> menyoroti bahwa pelaksanaan revitalisasi Pasar Tradisional bertujuan memperbaiki kondisi fisik pasar, meningkatkan daya saing terhadap pasar modern, dan mengubah pasar menjadi lebih layak, bersih, serta ramah lingkungan, dalam kasus ini yakni Pasar Padangsidempuan. Namun dalam prosesnya, revitalisasi menghadapi berbagai hambatan, terutama resistensi dari para pedagang. Resistensi tersebut muncul karena beberapa faktor, seperti penempatan lokasi pasar baru yang kurang strategis, minimnya akses transportasi umum, area parkir yang sempit, serta ketidaksiapan pedagang dalam hal permodalan setelah relokasi akibat kebakaran. Selain itu, keterlibatan pedagang dalam proses pengambilan keputusan dinilai minim, sehingga banyak dari mereka merasa tidak dilibatkan dan dirugikan. Pemerintah Kota Padangsidempuan merespons resistensi ini dengan berbagai strategi seperti sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dan kampanye pemasaran. Upaya ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan pedagang dan masyarakat terhadap pasar yang telah direvitalisasi. Meski secara fisik pembangunan pasar telah selesai dengan fasilitas yang memadai, hasil akhir menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan belum sepenuhnya pulih karena rendahnya okupansi dan minat pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya ditentukan oleh kualitas fisik bangunan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan

---

<sup>12</sup> Harahap, M. F. (2024). Analisis Penghambat Revitalisasi Pasar dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Padangsidempuan. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 61-75.

tersebut mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif<sup>13</sup>. Secara umum, penelitian ini berfokus pada upaya mengidentifikasi faktor-faktor ketidakpastian ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi resistensi pedagang, memahami pola komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk resistensi sosial yang muncul akibat rencana rehabilitasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial yang terjadi.

Studi ini menghadirkan perspektif baru dalam kajian resistensi sosial dengan menelaah strategi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi penolakan pedagang terhadap relokasi pasar<sup>14</sup>. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada regulasi dan perencanaan teknis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan partisipatif, sosialisasi intensif, skema kompensasi ekonomi, serta dialog terbuka antara pemerintah dan pedagang dapat menjadi solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami dampak dari strategi komunikasi dan keterlibatan sosial dalam kebijakan relokasi pasar, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Dengan mengkaji strategi penanganan resistensi sosial dalam konteks relokasi pasar, penelitian ini menawarkan model kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi institusi lain yang menghadapi dinamika serupa dalam penataan kawasan perdagangan.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan dibandingkan studi sebelumnya. Pertama, studi ini berfokus pada pemetaan sejak awal terhadap kekhawatiran pedagang terkait ketidakpastian ekonomi dan sosial, seperti potensi penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, serta ketidakjelasan

---

<sup>13</sup> Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022, January). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)* (Vol. 6, No. 1).

<sup>14</sup> Iqbal, M., Dara Kospa, H. S., & Mutaqin, Z. (2023). *Strategi Relokasi Pasar Tradisional Pangkalan Balai ke Pasar Baru Cangkring di Kedondong Raya Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, universitas indo global mandiri).

selama masa pembangunan. Kedua, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terdampak dapat membentuk penerimaan terhadap kebijakan. Tujuannya bukan hanya melihat dampak akhir dari rehabilitasi pasar, tetapi juga memahami proses sosial yang memengaruhi respons pedagang, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara lebih partisipatif, inklusif, dan minim resistensi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan identifikasi kebaruan penelitian, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana tanggapan konsumen terhadap rencana rehabilitasi Pasar Ploso, khususnya terkait aspek aksesibilitas dan kenyamanan dalam berbelanja; Kedua, bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam merespons kekhawatiran dan resistensi sosial yang muncul di kalangan pedagang; dan Ketiga, bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat terdampak, khususnya pedagang, dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi Pasar Ploso serta melihat pola komunikasi yang terbangun antara masyarakat terdampak dan pemerintah daerah selama proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan<sup>15</sup>. Secara umum, penelitian ini berfokus pada upaya mengidentifikasi faktor-faktor ketidakpastian ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi kekhawatiran pedagang, memahami dinamika komunikasi dua arah yang terjadi antara pemangku kebijakan dan para pelaku pasar, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk respons sosial terhadap rencana rehabilitasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan serta analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi sosial, persepsi, serta sikap pedagang terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang respons masyarakat dalam kebijakan pembangunan berbasis partisipasi, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah

---

<sup>15</sup> Al Misky, K. M., Alisha, K. Z., & Sutanto, I. A. (2026). Pola Komunikasi Antaraktor dan Respon Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Krisis Tanggul Muara Baru di Jakarta Utara. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).

dalam menyusun kebijakan rehabilitasi pasar yang inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengkaji dinamika sosial yang muncul dalam kebijakan rehabilitasi Pasar Tradisional Ploso di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami respons sosial yang kompleks, terutama terkait persepsi pedagang, kekhawatiran ekonomi, serta berbagai bentuk resistensi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah. Strategi studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan berinteraksi dengan pengalaman hidup masyarakat yang terdampak dalam konteks sosial-ekonomi tertentu. Dengan memfokuskan penelitian pada Pasar Ploso, studi ini berupaya memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana kebijakan rehabilitasi pasar tradisional memengaruhi relasi sosial, keamanan ekonomi pedagang, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Kerangka penelitian ini mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan publik dan teori resistensi sosial. Secara konseptual, penelitian ini menelaah hubungan antara tiga dimensi utama, yaitu: (1) ketidakpastian ekonomi, yang mencakup kekhawatiran mengenai penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, serta gangguan terhadap keberlanjutan usaha; (2) keterikatan sosial, yang merujuk pada ikatan emosional dan sosial para pedagang terhadap pasar tradisional sebagai ruang interaksi ekonomi sekaligus komunitas sosial; dan (3) komunikasi kebijakan, yang meliputi strategi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kebijakan serta melibatkan para pemangku kepentingan. Ketiga dimensi tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk respons pedagang terhadap program rehabilitasi pasar. Kerangka analisis ini merujuk pada teori resistensi sosial James C. Scott, khususnya konsep *everyday resistance* dan *infrapolitics*, yang menjelaskan bagaimana kelompok subordinat mengekspresikan ketidaksetujuan melalui bentuk-bentuk perlawanan yang bersifat halus, tidak langsung, dan sering kali tersembunyi, alih-alih melalui konfrontasi terbuka.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik kualitatif guna menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang terdiri atas pedagang pasar, perwakilan paguyuban pedagang, pejabat pemerintah daerah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat dalam proses kebijakan rehabilitasi pasar. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menargetkan individu yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan yang relevan mengenai kebijakan rehabilitasi tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan sekitar 15–20 partisipan yang merepresentasikan beragam perspektif pemangku kepentingan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi lapangan yang dilakukan baik di lokasi pasar lama maupun di area relokasi sementara untuk mengamati aktivitas sehari-hari pedagang serta pola interaksi sosial yang terjadi. Untuk melengkapi data primer, dilakukan pula analisis dokumen terhadap berbagai sumber seperti dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi media yang berkaitan dengan program rehabilitasi pasar.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik yang didukung oleh proses pengodean secara sistematis. Tahap pertama, seluruh rekaman wawancara dan catatan lapangan ditranskripsi dan diorganisasikan menjadi data tekstual. Tahap kedua, dilakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dari data, seperti kecemasan ekonomi, ketidakpastian relokasi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta bentuk-bentuk ekspresi resistensi informal. Tahap ketiga, kode-kode awal tersebut kemudian dikelompokkan melalui proses axial coding ke dalam kategori analitis yang lebih luas, seperti kerentanan ekonomi pedagang, identitas sosial dalam komunitas pasar, serta kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Tahap akhir dilakukan melalui selective coding untuk menafsirkan hubungan antar kategori tersebut serta menyusun penjelasan yang koheren mengenai respons pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi pasar. Dengan demikian, model analisis penelitian ini menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoretis James C. Scott guna menjelaskan bagaimana praktik everyday resistance muncul dalam konteks kebijakan pembangunan lokal.

Untuk menjamin kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian, beberapa strategi validasi diterapkan. Pertama, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Kedua, diterapkan triangulasi sumber dengan mengintegrasikan perspektif dari pedagang, pembuat kebijakan, serta pejabat pemerintah daerah. Proses pengumpulan data dilakukan hingga mencapai data saturation, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru yang relevan dengan persepsi dan respons pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi pasar. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan pertimbangan etis selama proses penelitian berlangsung. Seluruh partisipan terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, partisipasi mereka bersifat sukarela, dan identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini disajikan temuan utama mengenai respons pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi Pasar Ploso, termasuk resistensi yang muncul serta dinamika komunikasi antara pedagang sebagai pihak terdampak dengan pemerintah daerah. Analisis data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap para pedagang yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Hasil penelitian mencakup profil sosial pedagang, bentuk kekhawatiran atau resistensi ringan yang muncul, serta faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi sikap mereka terhadap proses rehabilitasi pasar<sup>16</sup>. Proyek rehabilitasi ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang sebagai pelaksana teknis, sementara DPRD Kabupaten Jombang berperan sebagai pengawas jalannya proyek sekaligus penyalur aspirasi masyarakat, khususnya pedagang, agar kebijakan yang diambil dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Menurut Pemaparan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, rehabilitasi Pasar Ploso dilakukan sebagai respons atas

---

<sup>16</sup> Evasari, A. D., Yani, A., & Syahputra, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar Pucung Jamban Kras Kediri Pada Masa Pandemi Covid-19. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 136-141.

banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pedagang, pembeli, bahkan anggota dewan sendiri terkait kondisi pasar yang sudah tidak layak. Keluhan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kerusakan fisik bangunan hingga fasilitas umum yang tidak berfungsi optimal. Pasar Ploso tercatat terakhir kali mengalami perbaikan pada tahun 2003, sehingga wajar jika saat ini ditemukan berbagai permasalahan seperti saluran air (drainase) yang tersumbat, toilet yang tidak memadai, atap bocor, serta lantai pasar yang becek saat musim hujan. Dalam hal ini, Komisi B tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pedagang dan juga Disdagrin selaku pelaksana teknis rehabilitasi, tetapi juga bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan. Fungsi pengawasan tersebut mencakup memastikan agar rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan aspirasi pedagang, serta mendorong agar prosesnya berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel ekonomi (seperti kekhawatiran kehilangan pelanggan, potensi penurunan omzet, dan gangguan aktivitas dagang selama proses pembangunan) dan variabel sosial (seperti keterikatan terhadap lokasi, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta solidaritas antar pedagang) dengan respons pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi, khususnya terkait kurangnya pelibatan aktif pedagang dan belum optimalnya komunikasi publik selama proses perencanaan dan sosialisasi.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam beberapa kategori:

### **Profil Sosial Pedagang**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, mayoritas pedagang di Pasar Ploso merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang telah berdagang di lokasi tersebut selama lebih dari satu dekade. Sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan sangat bergantung pada aktivitas jual beli di pasar sebagai sumber utama penghasilan<sup>17</sup>. Seperti

---

<sup>17</sup> Pasarela, H. (2021). Analisis Pengaruh Potensi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Paya Ilang). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 466470.

yang diungkapkan oleh Pak Rizal, seorang penjual daging yang telah lama menetap di pasar tersebut, muncul kekhawatiran ketika rencana rehabilitasi mulai disosialisasikan. Meskipun ia menyadari kondisi pasar saat ini terkesan kumuh dan kurang nyaman, ia merasa sudah terbiasa dan memiliki pelanggan tetap yang loyal. Dalam wawancaranya, Pak Rizal menyatakan bahwa kekhawatiran utamanya bukan pada perubahan fisik pasar, melainkan pada potensi gangguan selama proses pembangunan, risiko proyek tidak selesai, dan kemungkinan kehilangan pelanggan tetap. Kondisi ini mencerminkan keresahan kolektif para pedagang yang telah membangun jaringan sosial dan ekonomi di pasar secara bertahun-tahun. Dalam perspektif teori resistensi sosial Scott (1985), keresahan ini dapat dimaknai sebagai bentuk resistensi yang tidak bersifat terbuka, namun tersirat melalui sikap diam, kekhawatiran, dan ekspresi kehati-hatian. Scott menyebut bentuk ini sebagai infrapolitik, yaitu cara kelompok subordinat menyampaikan ketidaksetujuan tanpa konfrontasi langsung. Hal ini terlihat dari kecenderungan pedagang mempertahankan posisi dan kebiasaan lama mereka sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan relasi sosial yang telah mapan. Rehabilitasi pasar, meskipun tidak mengubah lokasi, tetap dianggap berisiko memutus pola interaksi dan kepercayaan yang sudah terbangun antara pedagang dan konsumen. Ketergantungan pada pelanggan tetap serta rutinitas yang sudah mapan menjadikan setiap bentuk perubahan baik sementara maupun permanen dipandang dengan penuh kehati-hatian oleh para pedagang.

Sebagian besar pedagang beroperasi dengan sistem mandiri, tidak tergabung dalam koperasi formal, dan tidak memiliki tabungan cadangan untuk mengantisipasi gangguan usaha. Dalam kondisi ini, rehabilitasi dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup ekonomi mereka.

### **Bentuk Resistensi yang muncul**

Hasil analisis menunjukkan bahwa resistensi ringan yang ditunjukkan pedagang terhadap kebijakan rehabilitasi dipengaruhi oleh kekhawatiran ekonomi dan keterikatan sosial. Temuan ini sejalan dengan studi Ariesta, I.<sup>18</sup> yang menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi pasar

---

<sup>18</sup> Ariesta, I. (2015). Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 41-52.

dapat memengaruhi pendapatan harian jika tidak disertai dengan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat yang baik. Pedagang merasa cemas terhadap potensi penurunan omzet, ketidakjelasan lokasi penampungan sementara, serta belum pastinya fasilitas dan biaya operasional selama proses pembangunan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh ikatan emosional terhadap pasar lama yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang komunitas yang membangun relasi sosial dan identitas kolektif. Temuan ini mendukung teori resistensi sosial Scott, bahwa resistensi muncul ketika perubahan dianggap mengancam stabilitas ekonomi dan ruang sosial yang sudah terbentuk lama, meskipun dalam kasus Pasar Ploso, resistensi yang terjadi cenderung bersifat pasif dan muncul sebagai bentuk kehati-hatian, bukan penolakan terbuka.

Dalam konteks ini, teori Scott membantu menjelaskan bahwa resistensi bukanlah bentuk pembangkangan langsung, melainkan ekspresi dari rasa kehilangan kendali atas lingkungan dan ruang hidup yang familiar. Sikap kehati-hatian para pedagang Pasar Ploso merupakan strategi bertahan yang mencerminkan upaya mempertahankan otonomi dan identitas dalam menghadapi kebijakan yang belum sepenuhnya mereka kuasai.

### **Strategi Penanganan dan Pola Komunikasi oleh Pemerintah**

Dalam merespons kekhawatiran pedagang terhadap rencana rehabilitasi Pasar Ploso, Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan beberapa strategi penanganan yang bersifat akomodatif. Salah satu langkah konkret adalah penyediaan tempat sementara untuk berdagang yang berlokasi tidak jauh dari pasar utama<sup>19</sup>. Penempatan yang strategis ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi para pedagang selama masa pembangunan, sekaligus meminimalkan risiko kehilangan pelanggan akibat perubahan lokasi. Dengan adanya lokasi sementara yang mudah dijangkau, pedagang tetap dapat menjalankan usahanya, meskipun dengan keterbatasan fasilitas.

Selain itu, pemerintah juga membangun pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif untuk menurunkan resistensi dan menciptakan

---

<sup>19</sup> Demas, K. L., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda. *Jurnal Ruang*, 7(2), 96-104.

suasana yang kondusif. Komunikasi tidak dilakukan secara satu arah, melainkan melalui diskusi langsung antara pedagang dan pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Jombang. Forum ini menjadi ruang tukar pendapat di mana pedagang dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan secara langsung kepada pembuat kebijakan. Karena sebagian besar pedagang telah menempati pasar tersebut selama puluhan tahun, mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi pasar, termasuk celah struktural, area yang sering mengalami kerusakan, serta kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan rehabilitasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga kontekstual dan sesuai kebutuhan pengguna.

Lebih lanjut, untuk menjangkau seluruh pedagang secara merata, dilakukan pula sosialisasi melalui Ketua Paguyuban Pasar Ploso. Paguyuban berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pedagang, memastikan bahwa seluruh informasi terkait waktu pelaksanaan, lokasi penampungan, dan rencana fasilitas disampaikan secara transparan. Jalur komunikasi ini memperkuat rasa keterlibatan pedagang dalam proses pembangunan dan membantu mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan keresahan. Strategi komunikasi dan penanganan inilah yang menjadi kunci utama dalam menciptakan penerimaan yang lebih baik terhadap kebijakan rehabilitasi pasar<sup>20</sup>.

### **Analisis dalam Kerangka Teori Resistensi Sosial**

Dalam kerangka Teori Resistensi Sosial, Resistensi ringan terhadap kebijakan rehabilitasi dapat dipahami sebagai bentuk respons dari kelompok yang merasa tidak memiliki cukup kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teori Scott (1985) tentang resistensi sebagai pisau analisis utama, penelitian ini mengasilkan temuan bahwa Resistensi yang muncul dalam kasus ini mencerminkan kekhawatiran pedagang terhadap proses pembangunan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dan ruang sosial yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, terutama jika partisipasi mereka dalam proses perencanaan tidak diakomodasi secara memadai. Scott menekankan

---

<sup>20</sup> Adityanto, A., & Paselle, E. (2024). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda). *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 50-63.

pentingnya melihat bentuk-bentuk resistensi kecil seperti keluhan, diam, atau ketidakterlibatan sebagai simbol ketidaksetujuan terhadap dominasi struktural. Dalam kasus Pasar Ploso, ketidakterlibatan aktif sebagian pedagang dalam tahap awal perencanaan juga dapat dibaca sebagai bentuk resistensi pasif terhadap kebijakan yang mereka rasa tidak sepenuhnya mewakili suara mereka.

Temuan ini sejalan dengan prinsip kebijakan partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Tanpa keterlibatan tersebut, kebijakan rehabilitasi berisiko menimbulkan ketidakpuasan, kesenjangan informasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, membangun komunikasi dua arah dan menampung aspirasi pedagang menjadi langkah penting agar rehabilitasi pasar tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga diterima secara sosial<sup>21</sup>.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi Pasar Ploso tidak hanya merupakan persoalan teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi arena politik kebijakan yang sarat dengan relasi kekuasaan dan ketimpangan informasi. Pedagang sebagai kelompok terdampak tidak memperoleh ruang partisipasi yang memadai, sehingga kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian cenderung dipersepsikan sebagai keputusan top-down yang mengabaikan aspirasi mereka. Minimnya dialog, ketidakjelasan informasi mengenai relokasi dan pembagian lapak, serta ketiadaan mekanisme negosiasi membuat pedagang merasa kehilangan kontrol atas ruang ekonomi mereka.

Dalam kondisi tersebut, resistensi sosial muncul sebagai bentuk respons pedagang terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Resistensi ini tidak diwujudkan melalui protes terbuka, tetapi melalui strategi infrapolitik seperti menunda relokasi, tetap berjualan di area terlarang, mengurangi kehadiran dalam forum sosialisasi, serta

---

<sup>21</sup> Kristinawati, N. L. (2025). Perspektif Good Governance Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(1).

mengekspresikan keluhan secara informal. Bentuk-bentuk ini selaras dengan teori Resistensi Sosial James C. Scott, di mana kelompok subordinat menggunakan cara-cara halus untuk mempertahankan kepentingannya ketika saluran formal tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityanto, A., & Paselle, E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL:(STUDI KASUS PASAR PAGI SAMARINDA). *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 50-63.
- Al Misky, K. M., Alisha, K. Z., & Sutanto, I. A. (2026). Pola Komunikasi Antaraktor dan Respon Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Krisis Tanggul Muara Baru di Jakarta Utara. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
- Ariesta, I. (2015). Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 41-52.
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.
- Evasari, A. D., Yani, A., & Syahputra, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar Pucung Jamban Kras Kediri Pada Masa Pandemi Covid-19. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 136-141.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022, January). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)* (Vol. 6, No. 1).
- Harahap, M. F. (2024). Analisis Penghambat Revitalisasi Pasar dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Padangsidempuan. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 61-75.
- Hasanah, U., Lydianingtias, D., & Setiono, J. (2024). Analisis Penerapan Smk3 Pada Proyek Rehabilitasi Pasar Jongke Kota Surakarta. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, 5(4), 20-28.
- Iqbal, M., Dara Kospa, H. S., & Mutaqin, Z. (2023). STRATEGI RELOKASI PASAR TRADISIONAL PANGKALAN BALAI KE PASAR BARU CANGKRING DI KEDONDONG RAYE KABUPATEN BANYUASIN (Doctoral dissertation, universitas indo global mandiri).
- Kristinawati, N. L. (2025). Perspektif Good Governance Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(1).
- Legi, C., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2023). Kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dalam Mengelola Pasar Tua Tombatu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. *GOVERNANCE*, 3(1).

- Manalu, M. F. J. (2025). Transformasi Profetik Huria Kristen Batak Protestan dalam Konflik Sosial-Ekologis. *MARSAHALA: Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(1), 26-35.
- Muarif, M. R. F., & Darmiyanti, A. (2022). Resistensi dalam Kajian Manajemen Perubahan pada Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 5842-5847.
- Muftiandar, E. (2021). Resistensi tokoh-tokoh perempuan lokal Papua terhadap budaya Patriarki dalam novel “Tanah Tabu” karya Anindita S. Thayf. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 5(2), 160-173.
- Mulyono, E. C., & Alfin, C. (2022). Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pasar Baru Kabupaten Lumajang Berwawasan Lingkungan. *Journal of Science Nusantara*, 2(2), 58-67.
- Panyusunan, R., Nawawi, Z. M., & Tambunan, K. (2024). Analisis Penghambat Revitalisasi Pasar Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Aksara Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 30-39.
- Pararuk, K., Malingkas, G. Y., & Mangare, J. B. (2023). Metode Pelaksanaan Konstruksi Pondasi Bor Pile Pada Bangunan Hanggar Proyek Rehabilitasi Pasar Bersehati Manado. *TEKNO*, 21(85), 1265-1272.
- Sulistiyo, T. D., Gantina, D., Haryono, J., Rachmatullah, A., & Aditya, M. K. (2025). Keberadaan Pasar Tradisional di Jakarta Sebagai Destinasi Wisata. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 30(1), 66-84.